

Pernikahan Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Perkawinan Di Indonesia

(Marriage of Minors from the perspective of Islamic law an marriage la in Indonesia)

Melin Manik¹, Aripa Syawalia², Putri Azri Sipahutar³, Zahra Balqis Ananda Lubis⁴, Mutiara Khalishah⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia Email: melinmanik54@gmail.com¹, aripasyawalia@gmail.com², putriazri0605@gmail.com³, zahrabalqisananda@gmail.com⁴, Mutiaraklsh@gmail.com5

> Abstract: In this article, we examine early marriage from the perspective of Islamic law and marriage law in Indonesia. The aim is to find out the flexible age limit if you want to get married as stipulated in the law, namely the minimum age for men and women is 19 years. However, there are still many marriages that occur below the specified age limit. This research uses qualitative research methods, namely using a field study and analytical descriptive approach. The results of this research show that in jurisprudence it is permissible to marry under the age of consent based on the provisions of statutory regulations. According to him, in marriage, maturity (maturity) is the most important thing, apart from having the physical and spiritual ability to form a family. Meanwhile, the law prohibits the continuation of marriages under this age limit, but there is still the option of carrying out a marriage through a marriage dispensation from the parents.

Keywords: Conventional Law, Islamic Law, Early Marriage

Pendahuluan

Pernikahan merupakan komponen yang sangat penting dari kehidupan manusia, dalam memastikan keseimbangan antara kebutuhan psikologis dan biologis. Didalam konteks ajaran islam, Pernikahan adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan dalam Islam. Kebutuhan manusia yang dimaksud adalah kebutuhan biologisnya. Akan tetapi didalam Al-Qur'an menerangkan bahwa dengan melangsungkan pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang. Hal itu merupakan sebuah perjanjian yang memberi orang ketenangan dan kepuasan, sehingga mereka diberi kesempatan untuk membangun surga pribadi mereka di dunia yang didasarkan pada keyakinan Islam.

Perempuan lebih mungkin untuk memulai suatu hubungan, bukan karena kebutuhan pribadinya seperti pekerjaan, status sosial ekonomi, atau lainnya. Namun, penyandang disabilitas fisik dan mental sering kali melakukan aktivitas

¹ Mohsi M, "Pencatatan Perkawinan sebagai rekonseptualisasi system saksi perkawinan berbasis maslahah al-adalah" Jurnal Syariah dan Hukum", Vol.4,No.2,2019,Hal.134-148

yang mengubah hidup jika memenuhi kriteria tertentu. Pernikahan dianggap sebagai komitmen seumur hidup secara teoritis. Namun, masih sulit untuk memahami makna sebenarnya dari pernikahan, yaitu mencapai kebahagiaan dalam kehidupan. Penetapan batas usia yang sesuai, yang sangat terkait dengan kematangan psikologis adalah pertimbangan penting dalam konteks pernikahan.² Karena kurangnya kesadaran dan akuntabilitas tentang kehidupan perkawinan yang rumit, persatuan yang dibentuk terlalu dini mengakibatkan angka perceraian meningkat. Pernikahan sukses jika pasangan siap memikul tanggung jawab yang besar secara bersama.

Di Indonesia, penyebab perkawinan dini termasuk faktor individu, keluarga, dan lingkungan, seperti kebutuhan ekonomi keluarga dan kultur nikah muda. Selain pernikahan dibawah umur terhadap perempuan muda yang berkembang memiliki konsekuensi pada kesehatan dan psikologis seseorang. Dampak negatifnya termasuk kurangnya akses ke layanan kesehatan, emosi yang tidak terkontrol sehingga tidak bijak dalam pengambilan keputusan, kandungan yang rentan akan keguguran, keributan yang menyebabkan perceraian, putus jenjang karier, penyakit jantung, kanker, dan gangguan kesehatan lainnya.³

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Musfiroh, yang berjudul "Pernikahan Usia Remaja, Ketahanan Keluarga", De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, melakukan penelitian sebelumnya.4 Terori maqashid al-syariah digunakan sebagai metodologi deskriptif-kualitatif dalam penelitian ini. Untuk memperkuat pendapatnya tentang batasan usia pernikahan, penelitian ini dilakukan untuk membaharui hukum keluarga Islam. Hasil dari pembahasan mencakup diskusi yang membahasa tentang batasan usia menikah dalam hukum Indonesia, batasan pernikahan dini dalam hukum Islam, dan juga konsep magashid as-syari'ah tentang pernikahan usia dini.

Penelitian ini berdasarkan Hukum Islam dan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dan metode penelitian kualitatif. Data dan sumbernya berasal dari empat sumber. diantaranya data primer yang diambil dari undang-undang dan buku, kemudian data sekunder yang diambil dari artikel dan jurnal. Analisis data yang diambil untuk penelitian ini yaitu dengan teknik analisis isi yang berdasarkan perspektifnya. Analisis isi yaitu dengan cara menggambarkan kesimpulan dari apa yang mau diteliti dari buku yang sudah dipilih. Terakhir, penelitian ini menggunakan penelitian berkualitas tinggi untuk menganalisis hasil penelitian utama. Tergantung pada metode perolehan bahan dasar, data primer dan sekunder harus dikumpulkan dengan cermat. Metode analisis data yang dianalisis adalah: Beberapa metode, seperti analisis isometrik, ditujukan untuk menyelidiki pokok bahasan secara jelas dan tepat, termasuk pokok bahasan buku yang sedang diselidiki.

² Heryanti, R, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Ius* Constituendum, Vol.6, No.1, 2021, Hal. 120-143

³ Elisabeth Putri, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", *Jurnal* Indonesia Sosial Sains, Vol.2, No.5, 2021, Hal. 738-746

⁴ Mosfiroh, M.R "Pernikahan Usia Remaja, Ketahanan Keluarga", *De Jure : Jurnal* Hukum Dan Syari'ah, Vol.8,No.2,Hal.64-73

Pembahasan

muslim⁶

A. Batasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Konvensional

Indonesia adalah negara dengan jumlah perkawinan anak di bawah batas usia tertinggi di dunia telah memasuki peringkat ketujuh didunia. Tujuan perkawinan saat ini lebih pada hubungan seksual. Imam Syāfi'i membagi usia calon istri menjadi tiga kategori: yaitu pertama, pernikahan wanita janda yang ditinggal mati maupun cerai, kemudian yang kedua yaitu pernikahan gadis yang sudah dewasa, dan yaitu pernikahan anak dibawah umur. Untuk wanita dewasa, umurnya adalah 15 tahun atau sampai pada waktu menstruasi.

Jika perkawinan yang dilakukan itu demi kepentingan terbaik untuk anaknya, maka seorang ayah dapat menikahkan anak perempuannya tanpa meminta persetujuan ibunya. Di Negara Indonesia telah menetapkan batas umur bagi mereka yang ingin menikah. Terdapat dalam UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa calon suami minimal berusia 19 tahun dan calon istri minimal berusia 16 tahun.⁵ Indonesia bukanlah negara muslim dengan calon pengantin tertua atau terendah apabila dibandingkan dengan negara muslim lainnya.

Berikut table hasil perbandingan batasan umur menikah di berbagai Negara

⁵ Departemen Agama RI, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Hal.19

⁶ Ahmad Rofiq, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), Hal.63

NO	NAMA	USIA	USIA LAKI -
	NEGARA	PEREMPUAN	LAKI
1.	Yaman Utara	15	15
2.	Jordania	15	16
3.	Turki	15	17
4.	Maroko	15	18
5.	Mesir	16	18
6.	Libya	16	18
7.	Malaysia	16	18
8.	Yaman Selatan	16	18
9.	Pakistan	16	18
10.	Libanon	17	18
11.	Suriah	17	18
12.	Tunisia	17	19
13.	Irak	18	18
14.	Somalia	18	18
15.	Aljazair	18	21
16.	Bangladesh	18	21
17.	Indonesia	19	19

Didalam peraturan perundang-undangan umumnya menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua pasangan sama-sama berusia 19 tahun. Merujuk kepada ketetntuan UU menjelaskkan bahwa seseorang harus meminta izin kedua orang tua mereka terlebih dahulu jika mereka belum mencapai umur 21 tahun. Dikarenakan menurut undang-undang bahwa perkawinan memungkinkan orang tua menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur, hingga saat ini orangtua tidak begitu paham dimana batas anak dapat dikatakan dewasa. Terutama pada anak perempuan yang dimana mereka beranggapan bahwa anaknya harus segera dinikahkan karena sudah mengalami perubahan besar pada bentuk tubuh nya. Kemudian ada juga faktor dari seorang anak yang beranggapan bahwa pernikahannya dapat dilaksanakan atas dasar rasa sesama suka.7

Dimungkinkan masih banyaknya persimpangan terhadap usia 19 tahun, bias dilakukan dengan meminta persetujuan dari orangtua masingmasing pihak. Ketentuan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan harus mencapai umur 19 tahun yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menurut aturan tersebut apabila terjadi ketidakcocokan dari persyaratan tersebut maka orangtua dari pihak laki-laki maupun perempuan diperbolehkan untuk mengajukan surat permohonan

⁷ Aafiyah, Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini, *Jurnal Multidisiplin* Ilmu, Vol.2, No.1,2024

pengecualian kepengadilan,dengan mengikuti bantuan yang sesuai dan berkualitas." Secara nasional periode tahun 2020-2023 kasus perkawinan anak mencapai rata rata 8,64 persen.

Setelah amendemen UU Perkawinan ditetapkan pada tahun 2019, bahkan angka dispensasi perkawinan anak sangat meningkat hingga 173% pada tahun 2020. Pada 2019, dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama mencapai 23.145 kasus, tetapi pada tahun berikutnya, angka tersebut meningkat menjadi 63.382 kasus. Sampai pada tahun 2022, jumlah dispensasi terus meningkat.

B. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pengertian nikah menurut bahasa dalam fikih tradisional, nikah muda biasanya disebut dengan an-nikah al-saghir atau al-saghirah, dan al-kabir kebalikannya disebut dengan atau al-kabirah. didalam istilah fikih baru yaitu al-zawaj al-mubakkir. Nikah muda merupakan perkawinan yang dilakukan antara anak laki-laki anak perempuan yang belum baligh yang dihitung berdasarkan tahun atau umur mereka.

Menurut pendapat Abu Hanifah, menyatakan bahwa pernikahan dibawah umur didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan sebelum usia 15 tahun ataupun setelah usia 18 tahun. Sedangkan Marmiati Mawardi menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang diantaranya laki-laki dan perempuan dimana keduanya masih muda dari usia perkawinan yang ditetapkan secara sah. contohnya seperti , laki-laki yang berusia 19 tahun dan perempuan yang berusia 16 tahun hal seperti inilah yang dianggap sebagai perkawinan di bawah umur. Dalam agama Islam, para pemuda harus segera menikah apabila mencapai usia yang sudah matang. Bagi yang sudah menikah tetapi belum cukup umur untuk menikah, Pengadilan Agama setempat harus mengupayakan dispensasi perkawinan.

Mampu dalam hal ini mencakup kemampuan fisik, mental, dan finansial termasuk kedalam keuangan maupun pendapatan. Usia bukan satu-satunya ukuran yang menentukan kemampuan seseorang untuk mendirikan keluarga, akan tetapi ukuran yang lebih penting adalah kedewasaannya. Kedewasaan menentukan kemampuan seseorang untuk mempersiapkan kehidupan bersama keluarga. Meskipun usia dapat menunjukkan seberapa dewasa seseorang,namun dari sudut pandang lain kedewasaan tidak menentukan usia. Rasulullah Saw menjadikan alasan itu untuk mendorong para pemuda agar menikah. Sebagaimana tercantum pada hadis Shahih Al-BukBukhari no 5066. Hadis ini dimaksudkan dan dijadikan acuan untuk mendorong para pemuda agar tidak takut untuk menikah. Selain itu tujuan dari pernikahan ini untuk mencegah fitnah dan

⁸ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

menjaga kesucian diri terutama untuk perempuan Namun, jika mereka tidak dapat melakukannya, mereka dapat berpuasa dan menahan diri terlebih dahulu untuk tidak melangsungkan pernikahan.

Dalam ilmu fikih, usia perkawinan berkaitan dengan syarat-syarat yang diperlukan oleh wali atas hak ijbar kepada calon pasangan untuk menikahkan anaknya yang masih kecil. Dalam hal kedewasaan,para ulama setuju bahwa disaat menikah mereka harus baligh dan berakal,kecuali pernikahan itu dilangsungkan oleh walinya. Menurut Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, menetapkan untuk usia balig anak laki-laki dan perempuan sama-sama berusia15 tahun. Menurut Mazhab Maliki menetapkan usia baligh adalah17 tahun, sementara Mazhab Hanafiyah menetapkan 18 tahun bagi anak laki-laki dan 17 tahun bagi anak perempuan. Usia minimum yaitu 12 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan.

Menurut Mazhab Maliki menganggap bahwa seorang janda yang berakibatkan karena cerai maupun ditinggal mati yang dimana janda ini belum dewasa dan juga belum disentuh oleh suaminya dianggap sama seperti perkawinan seorang gadis yang dimana bapaknya memiliki hak ijbar atas anaknya. Apabila dia sudah dicampuri, maka dia memiliki hak atas dirinya sendiri sama seperti seorang janda dewasa. Sedangkan Menurut Mazhab Hanafi, pada terjemahan QS. An-Nur Ayat (32).9

Berdasarkan penjelasan dari terjemahan ayat tersebut bahwa datanglah perintah untuk menikah yang dimana menikah merupakan salah satu cara untuk memelihara kesucian seorang perempuan. . Mereka yang masih membujang adalah orang yang pantas menikah. Dan bantulah mereka untuk menikah agar mereka bisa hidup dengan tenang dan terhindar dari peruatan zina. Telah dibenarkan bahwa Abu Bakar yang menikahkan Rasulullah dengan Aisya yang pada saat itu berusia 6 tahun. Kemudian pada saat Umar masih kecil,tetapi Ali telah menikahkan Umar dengan Ummu Kultsum. Kemudian pada saat Urwah bin Zubair yang masih kecil telah dinikahkan oleh ayahnya Abdullah bin Umar.

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa tidak diperboleh menikahkan anak yang dibawah umur kecuali dinikahkan oleh ayahnya. Sultan bertanggung jawab atas masalah seseorang yang dinikahkan oleh selain ayah mereka. Jika tidak, pernikahan tidak dapat dilanjutkan. Adapun beberapa sebab yang kuat yang dipakai untuk mendukung gagasan bahwa anak perempuan yang belum dewasa diperbolehkan menikah sebagai berikut:

(1) Mengenai ketentuan iddah seorang anak perempuan yang masih kecil, yaitu 3 bulan atau 3 kali bersih dari haid, yang dipahami berdasarkan dari penjelasan QS. At-Thalaq Ayat 4. Dimana masa iddah seorang perempuan yang sudah tidak haid lagi adalah 3 bulan, jika perempuan yang sedang hamil maka masa iddahnya sampai dia melahikan.

⁹ Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1998), Hal. 692

- (2) Dalam pemahaman QS. An-Nur Ayat 32 menjelaskan tentang perintah untuk menikahkan perempuan ,kemudian dapat dipahami bahwa itu mencakup anak kecil ataupun sudah dewasa.
- (3) Pada peristiwa dimana Rasulullah SAW yang telah menikahkan Aisyah ketika masih berusia 6 tahun.
- (4) Pendapat para sahabat yang telah menikahkan anaknya dan menikah dengan anak perempuan yang masih dibawah umur, mereka beranggapan bahwa adanya manfaat apabila menikahan anak kecil. 10

C. Faktor Penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur

Adapun beberapa faktor yang mengakibatkan perkawinan dibawah usia. diantaranya:11

- 1. Faktor Biologis
- 2. Faktor Ekonomi
- 3. Faktor adat istiadat
- 4. Faktor hamil diluar nikah
- 5. Faktor Kurangnya Pendidikan
- 6. Faktor dijodohkan kedua orangtua
- 7. Faktor atas kemauan diri sendiri
- 8. Faktor Perkembangan Zaman
- 9. Faktor rendahnya tingkat kesadaran orangtua terhadap pendidikan

Dari beberapa faktor diatas yang dapat menjadikan alasan penyebab seorang anak menikah di bawah umur, seperti kurangnya pengetahuan agama dan pendidikan, akhirnya menyebabkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang berlebihan sehingga terjadinya hamil di luar nikah. Selain itu, hal ini dapat disebabkan oleh tekanan ekonomi dan adat istiadat yang mewajibkan banyak perjodohan meskipun kedua anak masih kecil. Berbicara mengenai kemiskinan, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang telah menilai kekayaan dan kemiskinan keberhasilan. seseorang sebagai ukuran Demikian kemiskinanlah yang mendorong manusia untuk menghalalkan segalanya. Banyak berita tentang masalah kemiskinan disebarkan melalui media sosial dan media elektronik lainnya, termasuk pembunuhan, bunuh diri, dan bahkan hal lain diakibatkan karena kemiskinan. Dampaknya seperti orang tua yang sering meminta anak-anak mereka menikah meskipun mereka masih cukup muda dikarenakan ingin mengurangi beban dari orangtuanya. Semuanya dapat terjadi karena faktor kemiskinan, dan masyarakat

¹⁰ Muhammad Jihadul Hayat, Historisitas dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan Dalam Perundang-undangan Keluarga Muslim Indonesia dan Negara Muslim, Jurnal Equitable, Vol.3, No.1, 2018

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum",(Bandung,Citra Aditya Bakti, 2024), Hal. 134

melakukan hal-hal yang kurang mencerminkan kemanusiaan karena faktor ekonomi.

Pendidikan adalah faktor besar dan juga sangat penting dalam kemajuan suatu negara atau wilayah, dan bangsa yang paling maju adalah bangsa yang mempertahankan pendidikan. Ini akan menunjukkan bahwa semua orang dididik, karena pendidikan yang tinggi dapat menaikkan derajat seseorang. karena itu dengan belajar, seseorang dapat membedakan antara hal yang baik dan buruk untuk dirinya sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Pacaran dan pergaulan bebas akan mengakibatkan hamil diluar nikah dimana pengawasan setiap waktu dari orangtua yang sangat dibutuhkan untuk anaknya. Agar menghindari hal itu terjadi, selaku orang tua mengambil tindakan untuk menikahkan anaknya walaupun usia anak mereka masih di bawah batas ketetapan hukum. Selain itu, pasangan yang hamil diluar nikah akan segera dinikahkan untuk menutupi aib mereka biar tidak malu. Ekonomi membuat masyarakat menikahan anak mereka yang masih di bawah umur. Masyarakat memutuskan untuk menikah karena kebutuhan hidup yang meningkat sementara penghasilan yang terus menurun.

D. Akibat perkawinan di bawah umur

Didalam Pernikahan seorang anak yang masih dibawah usia akan melibatkan akibatnya pada waktu setelah terjadinya perkawinan tersebut. Adapun beberapa akibat yang akan terjadi sebagai berikut:

- 1. Kesehatan
- 2. Pendidikan
- 3. Fisik dan Mental
- 4. Ekonomi
- 5. Antara Suami dan Istri
- 6. Untuk anak-anaknya
- 7. Kelangsungan antar rumah tangga
- 8. Untuk keluarga bersangkutan¹²

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang menikah di bawah batas usia tidak hanya akan mengalami hal-hal positif, tetapi juga banyak pengaruh hal-hal negatif yang membuat mereka kehilangan keinginan untuk melanjutkan masa depannya. Kejadiannya bersamaan dengan perselisihan yang dapat menyebabkan perceraian, Contohnya seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Banyak kasus perceraian terjadi dikalangan remaja setelah mereka menikah. Dikarenakan mereka belum siap secara fisik maupun mentalnya,dimana mereka sama-sama memiliki sifat egois yang tinggi.

Oleh karena itu, dari perspektif hukum Islam, anak yang menikah di

¹² Hasan Bustami, Pernikahan Dini dan Dampakmya: Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia, Yudisia, Vol.7.No.2,2016, Hal.376-380

bawah umur tidak memiliki konsekuensi atau akibat hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan tersebut. Dalam Hukum Islam tidak melarang pernikahan di bawah umur asalkan kedua pasangan itu telah memenuhi persyaratan perkawinan sesuai dengan ketentuannya dan juga benarbenar sudah siap untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini dibenarkan apabila keduanya tidak mampu lagi untuk menahan nafsunya yang dikhawatirkan jika tidak menikah akan melakukan perzinaan.

E. Upaya menanggulangin terjadinya perkawinan di usia dini

Pemerintah mengklaim bahwa mengatasi pernikahan anak yang masih dibawah umur dapat diterapkan dengan baik berdasarkan cara memberikan edukasi ataupun pengarahan agar dapat memikirkan dampak yang akan terjadi kedepannya. Bukan hanya dampak jangka pendek dari instruksi, tetapi juga dampak jangka panjang, seperti halnya pengurangan jumlah anak yang menikah di bawah umur.

- 1. Pendidikan harus utamakan, yang berarti masyarakat harus dididik tentang seberapa pentingnya pendidikan minimal sampai pada bangku sekolah menengah atas. Dengan demikian, orangorang yang belajar akan memahami pentingnya kematangan dalam cara berpikir maupun bertindak saat menikah di usia yang cukup muda.
- 2. Orang tua harus dididik tentang cara menghentikan perkawinan agar tidak terlalu cepat. Seperti halnya menyajikan pemahaman bahwasannya penting mengetahui tentang kesehatan reproduksi untuk perempuan yang sangat rentan keguguran pada kehamilan yang sangat muda.
- 3. Menyajikan pemahaman yang berkaitan tentang perkawinan pada Undang-Undang Perkawinan, hal tersebut bias didapatkan melalui berbagai cara, seperti dalam pengajian, dan juga tokoh agama yang sudah ahli dalam bidang itu sendiri¹³

Untuk mengatasi maraknya kasus perkawinan anak dibawah usia sepantasnya, ada hukum Islam yang melarang bahkan menghentikan perbuatan tersebut dan juga adanya Peraturan undangan. Karena adanya larangan terhadap perbuatan perkawinan anak usia dini maka perlu dilakukan upaya untuk menegakkan semua hukum syar'iat agama islam di Indonesia. Ketika hukum syariat Islam diterapkan dalam strukturnya, tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah mereka terkena dampak dalam tindakan negatif yang disebabkan oleh perkawinan di bawah umur yang sering terjadi di tengah-

¹³ Syafruddin Syam & Bagus Ramadi, "Perkawinan Di Bawah Batas Usia Perspektif Fikih dan Undang-Undang", Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman, Vol. 9, No. 1, 2023

tengah masyarakat.14

Namun, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan, bahwa telah disebutkan untuk mengurangi dampak perkawinan dibawah umur harus dicegah. Pentingnya pencegahan ini adalah agar diantara kedua pasangan dapat mencapai tujuan utama perkawinan mereka. Untuk mencegah hal ini terjadi, pemerintah harus memastikan bahwa perkawinan tidak tercatat, bahaya seks bebas, dan pencegahan perkawinan usia dini terlaksana berdasarkan ketetapan Undang-Undang. Hal ini apabila diterapkan dengan semestinya maka akan menghasilkan generasi yang lebih baik lagi. Upaya seperti ini bisa dengan cara memaksimalkan lembaga pemerintah dan swadaya masyarakat.

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas, kami sebagai penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagai berikut: Menurut para ulama, perkawinan di bawah batas usia diperbolehkan atau mubah,tidak ada kitab fikih yang menetapkan syarat usia dan kemampuan ini terdapat pada persyaratan calon pasangan. Terdapat sedikit buku undang-undang yang merinci persyaratan usia, namun hal tersebut ditemukan di undang-undang di berbagai negara Islam. Menurut beberapa Mazhab dan mayoritas ahli hukum lainnya, diperbolehkan menikahi anak perempuan yang masih muda atau dalam masa kanak-kanak, dan ketika dia sudah dewasa (baligh), maka tidak ada kuncinya fasakh. Pernikahan dibawah batasan umur yang sah apabila laki-laki dan perempuan belum berusia 19 tahun. Meski dalam ajaran Islam tidak ada batasan usia tertentu untuk menikah, namun Islam mengatur bahwa seseorang boleh menikah setelah menginjak usia remaja (dewasa).

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan maraknya perkawinan dibawah umur, diantaranya adalah faktor pendidikan dan juga faktor ekonomi. Dengan adanya faktor pendidikan yang harus diterapkan kepada setiap anak pada bangku sekolahnya,yang kemudian apabila mereka menerapkannya maka mereka dapat membedakan baik buruknya suatu perbuatan. Sedangkan faktor ekonomi juga memberikan dampak yang besar seperti halnya orang tua yang sering meminta anak-anak mereka menikah meskipun mereka masih cukup muda dikarenakan ingin mengurangi beban dari orangtuanya. Melihat kasus hukum klasik, tidak ada batasan usia tertentu. Oleh karena itu, tergantung agamanya, sekalipun perkawinan dilakukan pada usia yang relatif muda, tetap sah asalkan harmonis dan memenuhi svarat-svaratnya.

¹⁴ Neng Djubaedah, dkk, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia", (Jakarta: Hecca Publishing: 2005), Hal.33

Daftar Pustaka

- Aafiyah(2024), Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini, Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol.2, No.1
- Abdul Kadir Muhammad, (2004), Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Asrori.A,(2015),"Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam, Jurnal Al-Adalah, Vol.12, No.4
- Bustami Hasan(2016), Pernikahan Dini dan Dampakmya: Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia, Yudisia, Vol.7.No.2
- Departemen Agama RI(1998), al-Quran dan Terjemahannya, Semarang: PT.Karya Toha Putra
- Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- Djubaedah N(2005), Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta: Hecca Publishing
- Hayat Muhammad(2018), Historisitas dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan Dalam Perundang-undangan Keluarga Muslim Indonesia dan Negara Muslim, Jurnal Equitable, Vol.3, No.1
- M Heryanti (2021), "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", Jurnal Ius Constituendum, Vol.6, No.1
- M. Mohsi(2019), "Pencatatan Perkawinan sebagai rekonseptualisasi system saksi perkawinan berbasis maslahah al-adalah" Jurnal Syariah dan Hukum", Vol.4,No.2
- Nasution Khoiruddin (2019), Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Yogyakarta: ACADEMIA
- Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Putri Elisabeth(2021), "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol.2, No.5

- Rofiq Ahmad(2013), Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo
- Syam Syafruddin, Ramadi Bagus (2023), Perkawinan Di Bawah Batas Usia Perspektif Fikih dan Undang-Undang, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman, Vol.9, No.1
- R. M. Mosfiroh(2016) "Pernikahan Usia Remaja, Ketahanan Keluarga", De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah, Vol.8, No.2